

PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PENYU PANGUMBAHAN (*Role of Stakeholders in the Management of Pangumbahan Turtle Conservation Area*)

Sri Harteti¹, Sambas Basuni², Burhanuddin Masy'ud³ & Fredinan Yulianda⁴

¹Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680. Email: hartetisri@yahoo.co.id.

^{2,3}Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga.

⁴Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Jalan Rasamala Kampus IPB Darmaga.

Diterima 26 Februari 2013, direvisi 1 April 2013, disetujui 28 April 2014

ABSTRACT

Sea turtle conservation policy focuses on setting some sea turtle nesting habitat as conservation area. Pangumbahan sea turtle conservation area is one of the sea turtle conservation areas in Java island. The highest level of threat faced by sea turtle conservation requires an integrated multistakeholders roles. Therefore, the sea turtle conservation activities need an analysis to determine interests, importance, influence, and relations of various stakeholders in management of sea turtle conservation. This study aims at identifying, categorizing and investigating relationship among stakeholders, as well as formulating strategies to increase the role of stakeholders. Respondents were selected by snowball sampling method. In general, stakeholders are more involved in the utilization activities, which comprise 17 stakeholders, whereas the lowest stakeholders engagement are in preservation activities that comprise 8 stakeholders. Protection activities involved 14 stakeholders. Stakeholder relationships consist of conflict and communication. To meet the sea turtle conservation management objectives, the involvement of stakeholders needs to be improved through community empowerment, improvement and enhancement of collaborative community participation.

Keywords: Sea turtle conservation, stakeholder analysis, Pangumbahan.

ABSTRAK

Kebijakan konservasi penyu dilakukan dengan menetapkan beberapa habitat peneluran penyu sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi penyu Pangumbahan merupakan salah satu kawasan konservasi penyu di Pulau Jawa. Tingginya tingkat ancaman yang dihadapi oleh konservasi penyu memerlukan peran *multistakeholders* yang terpadu. Oleh karena itu, kegiatan konservasi penyu memerlukan *analisis stakeholders* untuk mengetahui kepentingan, nilai penting, pengaruh, dan hubungan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan konservasi penyu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi dan menyelidiki hubungan diantara *stakeholders*, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan peran *stakeholders*. Pemilihan responden dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Pada umumnya *stakeholders* lebih banyak terlibat pada kegiatan pemanfaatan, yaitu sebanyak 17 *stakeholders*, sedangkan keterlibatan *stakeholders* terendah terjadi pada kegiatan pengawetan, yaitu 8 *stakeholders*. Adapun kegiatan perlindungan melibatkan 14 *stakeholders*. Hubungan *stakeholders* yang terjadi meliputi hubungan konflik dan komunikasi. Untuk meningkatkan tujuan pengelolaan konservasi penyu, keterlibatan *stakeholders* perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kegiatan kerjasama dan peningkatan peran serta masyarakat.

Kata kunci : Konservasi penyu, analisis *stakeholders*, Pangumbahan

I. PENDAHULUAN

Penyu merupakan jenis reptil yang telah dimanfaatkan untuk kebutuhan subsisten, ekonomi dan budaya bagi masyarakat pesisir di seluruh Indonesia (Suwelo, *et al.* 1989; Wahyuni, *et al.* 1994; Karnan, 2008). Pemanfaatan penyu yang tinggi oleh manusia menyebabkan populasi penyu mengalami penurunan. Disamping pengaruh manusia, faktor alam juga mengancam keberadaan penyu seperti predator, penyakit dan perubahan iklim (Gibbons *et al.* 2000). Menurut Bouchard dan Bjorndal (2000), penyu memiliki manfaat secara ekologis yaitu memberikan nutrisi dan energi dalam bentuk telur ketika bersarang ke ekosistem pantai yang miskin nutrisi.

Semua jenis penyu masuk ke dalam *red list* di IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) dan Appendiks I CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang berarti bahwa keberadaannya di alam telah terancam punah, sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus dikendalikan. Sehubungan dengan itu, berbagai kebijakan dibuat oleh Pemerintah Indonesia, antara lain menetapkan penyu sebagai satwa dilindungi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 dan menetapkan beberapa habitat peneluran penyu sebagai kawasan konservasi.

Pantai Pangumbahan merupakan pantai peneluran penyu hijau (*Chelonia mydas*) terbesar di Jawa Barat. Pantai Pangumbahan terletak di Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2008 pantai Pangumbahan dicadangkan sebagai Taman Pesisir Penyu Pangumbahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Panjang pantai Kawasan Konservasi Penyu (KKP) Pangumbahan yang menjadi habitat peneluran

penyu adalah 2.300 m. Populasi penyu hijau yang bersarang di Pantai Pangumbahan dari tahun 2008-2012 menunjukkan tren yang menurun yaitu jumlah penyu yang bertelur sebanyak 3.160 ekor tahun 2008 menjadi 727 ekor tahun 2012.

Penurunan populasi penyu di KKP Pangumbahan menunjukkan belum berhasilnya kegiatan pengelolaan konservasi penyu. Penyebabnya adalah masing-masing *stakeholders* (para pihak/pemangku kepentingan) berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing. Padahal pendekatan *multistakeholders* yang terpadu perlu dilakukan untuk pengelolaan konservasi penyu. Kebijakan *multistakeholders* secara terpadu sesuai dengan West (2010) yang menyatakan bahwa tingginya ancaman yang dihadapi oleh konservasi penyu memerlukan peran *multistakeholders* yang terpadu. Dengan demikian, upaya konservasi penyu yang komprehensif dan melibatkan berbagai *stakeholders* merupakan program penting dan mendesak untuk melindungi dan menyelamatkan populasi penyu, terutama bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki 6 dari 7 jenis penyu di bumi saat ini.

Oleh karena itu, kegiatan konservasi penyu memerlukan *analisis stakeholders* untuk mengetahui nilai penting, pengaruh, konflik dan komunikasi *stakeholders* dalam pengelolaan konservasi penyu. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi *stakeholders*, 2) mengkategorikan *stakeholders*; 3) menyelidiki hubungan antara *stakeholders*; dan 4) merumuskan strategi meningkatkan peran *stakeholders*.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian analisis *stakeholders* ini dilakukan di KKP Pangumbahan, Kabupaten

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan pada bulan Maret-Desember 2012. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Istilah *stakeholders* sudah sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Groenendijk (2003) menyatakan bahwa *stakeholders* mencakup semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan dari sebuah proyek. Analisis *stakeholders* diterapkan untuk mengungkapkan kepentingan, nilai penting dan pengaruh *stakeholders*, memahami konflik dan komunikasi antara *stakeholders* di KKP Pangumbahan. Menurut Reed *et al.* (2009), analisis *stakeholders* dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorikan dan menyelidiki hubungan antara *stakeholders*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi dikumpulkan dengan wawancara semi terstruktur. Metode untuk mengidentifikasi *stakeholders* dilakukan melalui *snowball sampling* yaitu pencarian informan secara bergulir melalui informan sebelumnya (Bungin, 2007).

C. Analisis Data

Metode untuk mengkategorisasi *stakeholders* dilakukan berdasarkan analisis kepentingan (*interest*) dan pengaruh *stakeholders* melalui matriks klasifikasi *stakeholders*. Selanjutnya, analisis *stakeholders* dilakukan dengan penafsiran matriks nilai penting dan pengaruh *stakeholders* terhadap pengelolaan konservasi penyu melalui kegiatan perlindungan, pengawetan dan perlindungan.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur nilai penting *stakeholders* dilakukan berdasarkan relevansi kepentingannya dengan nilai satwa liar yaitu nilai penyu. Skor tinggi diberikan kepada *stakeholders* yang kebutuhan dan harapannya relevan dengan nilai penyu.

Nilai penyu yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari Butler, *et al.* (2003) dan Kellert (2007) yaitu nilai sosial, komunikasi, toleransi atau interaksi dengan manusia serta humanistik dan moral.

Pengaruh *stakeholders* terhadap pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan diukur berdasarkan instrumen dan sumber kekuatan (Nistyantara, 2011). Pengaruh *stakeholders* tersebut berupa *condign power*, *compensatory power*, *conditioning power*, dan *organisation power*. Nilai penting dan pengaruh *stakeholders* ditetapkan melalui skoring (Abbas, 2005) yaitu pengukuran data berjenjang 5.

Nilai skor dari jawaban *stakeholders* terhadap nilai penting dan pengaruh dijumlahkan dan nilainya dipetakan ke dalam matriks klasifikasi *stakeholders*. Matriks klasifikasi *stakeholders* terdiri dari empat kuadran. Posisi *stakeholders* pada kuadran menggambarkan kategori *stakeholders* dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan. Posisi-posisi tersebut adalah *subjects* menggambarkan *stakeholders* yang mempunyai nilai penting tinggi tetapi pengaruh rendah, *key players* menggambarkan *stakeholders* yang mempunyai nilai penting dan pengaruh tinggi, *context setters* menggambarkan *stakeholders* yang mempunyai nilai penting rendah tetapi pengaruh tinggi dan *crowd* menggambarkan *stakeholders* yang mempunyai nilai penting dan pengaruh rendah. *Stakeholders* kunci yaitu *stakeholders* yang cukup signifikan mempengaruhi adalah *subject*, *key players* dan *context setters* (Groenendijk, 2003). *Stakeholders* yang berada pada *crowd* mendapatkan prioritas yang rendah dari aktifitas pengelolaan.

Analisis hubungan *stakeholders* dilakukan secara deskriptif. Hubungan *stakeholders* diidentifikasi melalui matriks yang menggambarkan hubungan berkonflik dan komunikasi (Groenendijk, 2003 dan Reed, *et al.* 2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi *Stakeholders*

Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan teridentifikasi sebanyak 24 pihak (Tabel 1). *Stakeholders* tersebut

merupakan perwakilan dari pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. *Stakeholders* tersebut diklasifikasikan berdasarkan kegiatan konservasi yaitu *stakeholders* perlindungan, *stakeholders* pengawetan, dan *stakeholders* pemanfaatan.

Tabel 1. *Stakeholders* pengelolaan konservasi penyu

Table 1. *Stakeholders of sea turtle conservation management*

<i>Stakeholders</i>	Kategori (Category)	Perlindungan (Protection)	Pengawetan (Preservation)	Pemanfaatan (Utilization)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP)	Pemerintah	√	√	√
Kementerian Kehutanan (Kemenhut)	Pemerintah	√	√	√
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (BBKSDA)	Pemerintah	√	√	√
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (DKP)	Pemerintah	√	√	√
Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi (Dispar)	Pemerintah			√
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi (Dishut)	Pemerintah	√	√	
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi (BLH)	Pemerintah	√		
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi (Bappeda)	Pemerintah	√		√
TNI Angkatan Laut (TNI-AL)	Pemerintah	√		
Polisi Sektor Kecamatan Ciracap (Polsek)	Pemerintah	√		
Polisi Perairan (Polair)	Pemerintah	√		
Desa Pangumbahan (DP)	Pemerintah	√	√	√
Desa Ujung Genteng (DUG)	Pemerintah	√		√
Desa Gunung Batu (DGB)	Pemerintah	√		√
Masyarakat Desa Pangumbahan (MDP)	Masyarakat			√
Masyarakat Desa Ujung Genteng (MDUG)	Masyarakat			√
Masyarakat Desa Gunung Batu (MDGB)	Masyarakat			√
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Masyarakat	√	√	
Kelompok Masyarakat Pelestari Penyu (KMPP)	Masyarakat			√
Pencuri telur (Penggemar)	Masyarakat			√
Organisasi Pemuda Ojek Wisata (OPOW)	Masyarakat			√
Wisatawan	Masyarakat			√
<i>World Wide Fund for Nature</i> (WWF)	LSM		√	
Institut Pertanian Bogor (IPB)	Perguruan Tinggi			√

Stakeholders pemerintah yang terlibat dalam konservasi penyu meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pemerintah pusat yang mempengaruhi kebijakan konservasi penyu adalah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP). Kedua kementerian tersebut memiliki tupoksi yang sama dalam mengelola kelompok biota laut yang dilindungi melalui upaya konservasi, baik konservasi kawasan maupun konservasi keanekaragaman hayati. Tugas pokok Kemenhut dalam konservasi penyu diatur dengan PP Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan tupoksi KKP dalam mengelola konservasi penyu yang termasuk jenis sumber daya ikan merujuk pada UU Nomor 45 Tahun 2009.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (BBKSDA Jabar) menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan konservasi serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi. Jadi pengelolaan konservasi penyu di Pangumbahan merupakan salah satu tugas BBKSDA Jabar.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi merupakan pengelola KKP Pangumbahan. Pengelolaan secara operasional dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Konservasi Penyu Pangumbahan. Tujuan pengelolaan KKP Pangumbahan adalah: 1) terwujudnya kelestarian penyu dan habitatnya di Pantai Pangumbahan dan perairan sekitarnya; 2) meningkatnya pengembangan ekowisata berbasis konservasi penyu; 3) meningkatnya sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi (DKP, 2011).

Stakeholders lainnya dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi adalah Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dispar), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishut), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). *Stakeholders* dari pemda adalah perpanjangan tangan Bupati Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan misi daerah dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berakhlak mulia, maju dan sejahtera.

Stakeholders yang terlibat dalam penegakan hukum adalah TNI Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Sektor Kecamatan Ciracap (Polsek) dan Polisi Perairan (Polair). LSM yang turut berperan dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan adalah *World Wide Fund for Nature-Indonesia* (WWF-Indonesia). WWF-Indonesia melakukan kegiatan pelatihan dan mediasi di KKP Pangumbahan. Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan institusi pendidikan yang melakukan banyak kegiatan penelitian di KKP Pangumbahan. Selain penelitian, kegiatan praktek lapangan mahasiswa IPB juga dilakukan di KKP Pangumbahan.

Desa Pangumbahan, Desa Ujung Genteng dan Desa Gunung Batu adalah *stakeholders* pemerintah desa yang memiliki kepentingan sangat tinggi terhadap pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan. Kondisi ini disebabkan KKP Pangumbahan berada di wilayah administrasi Desa Pangumbahan, sehingga kepala desa berkewajiban mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di wilayahnya. Desa Ujung Genteng dan Desa Gunung Batu merupakan desa penyangga bagi pelaksanaan konservasi penyu. Kedua desa tersebut berperan sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan penyu di KKP Pangumbahan yaitu sebagai buffer (daerah penyangga) dalam mengurangi tekanan masyarakat yang berinteraksi tinggi terhadap kawasan dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat.

Masyarakat sebagai *stakeholders* terdiri atas masyarakat lokal dari tiga desa (Desa Pangumbahan, Desa Ujung Genteng dan Desa Gunung Batu) yang berdomisili di sekitar KKP Pangumbahan dan pengunjung. Menurut Risien dan Tilt (2008), masyarakat lokal memiliki ketergantungan dan kepentingan yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya alam di sekitar mereka. Oleh karena itu, masyarakat dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan.

Sumber penghasilan utama ketiga desa tersebut adalah pertanian dengan komoditas utamanya adalah padi. Menurut Badan Pusat Statistik (2011), lahan pertanian masyarakat masih menggunakan jenis pengairan tadah hujan yaitu Desa Pangumbahan (73,81%), Desa Ujung Genteng (75,00%) dan Desa Gunung Batu (54,29%). Jenis pengairan tadah hujan menyebabkan masyarakat hanya bisa menanam padi maksimal dua kali penanaman kalau masih ada musim hujan, tetapi seringkali hanya satu kali penanaman. Kondisi ini menyebabkan pendapatan masyarakat dari pertanian sangat terbatas. Masyarakat mencari alternatif penghasilan lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah dan cepat seperti mencari ikan, kerang, udang, termasuk telur penyu serta sumberdaya alam lainnya yang dapat dijadikan penunjang kehidupannya (Gunawan, 2005).

B. Kepentingan Stakeholders

Kepentingan *stakeholders* terhadap pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan sangat beragam sesuai dengan kewenangan, peran, harapan dan manfaat *stakeholders*

terhadap pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan. Kepentingan *stakeholders* tersebut ada yang bersinergi dan ada yang bertentangan dengan tujuan pengelolaan penyu di kawasan tersebut.

Hasil dari analisis kepentingan *stakeholders* pada Tabel 2 mendapatkan beberapa *stakeholders* yang memiliki kepentingan sama. Kepentingan *stakeholders* secara keseluruhan bersinergi dengan tujuan pengelolaan KKP Pangumbahan. Namun demikian kepentingan masyarakat yang mencuri telur penyu (penggemar) tidak bersinergi dengan tujuan pengelolaan yaitu pengambilan telur penyu. Penggemar mengambil telur penyu untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena dengan menjual telur penyu sebesar Rp 3.000,- per butir mereka mendapatkan uang untuk membeli beras. Selain itu, kegiatan pengambilan telur penyu dilakukan penggemar untuk mendapatkan uang secara cepat dan tanpa modal. Selain itu, kondisi ini juga dilatarbelakangi oleh pendidikan masyarakat yang rendah yaitu sebagian besar tamat SD sehingga masyarakat tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mencari alternatif pekerjaan lain dan juga kepemilikan lahan pertanian masyarakat sangat kecil. Menurut Wahid (2008), golongan miskin adalah petani yang tidak memiliki lahan sendiri, petani yang hanya memiliki lahan sempit yang hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga, kaum buruh yang tidak terpelajar/terlatih, pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan masyarakat ini merupakan salah satu pemicu tingginya tingkat pencurian telur penyu di KKP Pangumbahan.

Table 2. Kepentingan stakeholders
 Table 2. Interests of stakeholders

Stakeholders	Kepentingan (Interests)											
	Kelestarian penyu dan habitatnya (<i>Preservation of sea turtles and their habitats</i>)	Pengembangan ekowisata (<i>Ecotourism development</i>)	Pengamanan terpadu (<i>Integrated security</i>)	Pengakuan hukum (<i>law enforcement</i>)	Sosialisasi peraturan (<i>Regulation socialization</i>)	Peningkatan pendapatan masyarakat (<i>Increase of community income</i>)	Peningkatan lapangan kerja (<i>Expansion of employ- ment</i>)	Peningkatan kapasitas masyarakat (<i>Increase of community capacity</i>)	Kolaborasi dengan masyarakat (<i>Collaboratio n with community</i>)	Koordinasi antara stakeholders(C oordination among stakeholders)	Pengembang an ilmu pengetahuan terkait penyu dan habitatnya (<i>Knowledge development about sea turtles and their habitats</i>)	Mendapatkan telur penyu (Get turtle eggs)
KemenKP	✓	✓		✓								
Kemenhut	✓	✓		✓								
BBKSDA	✓	✓	✓	✓					✓			
DKP	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	
Dispar	✓	✓	✓									
Dishut	✓	✓	✓									
BLH	✓											
Bappeda	✓											
TNI-AL			✓		✓					✓		
Polsek			✓		✓					✓		
Polair			✓		✓					✓		
DP	✓	✓				✓						
DUG		✓			✓							
DGB					✓							
MDP					✓							
MDUG					✓							
MDGB					✓							
Pokmaswas	✓											
KMPP	✓				✓							✓
Penggemar												
OPOW												
Wisatawan		✓										
WWF	✓											
IPB	✓							✓			✓	

C. Kategorisasi Stakeholders

Kategorisasi *stakeholders* dipetakan dari nilai penting dan pengaruh *stakeholders*. *Stakeholders* yang memiliki nilai penting yang tinggi terhadap kegiatan perlindungan dan pengawetan yaitu DKP, pemerintah pusat (KemenKP, Kemenhut dan BKSDA), desa dan Pokmaswas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *stakeholders* tersebut memiliki relevansi yang besar terhadap keberhasilan nilai sosial penyu yaitu kelestarian nilai ekologi dan nilai ilmiah penyu dibandingkan dengan *stakeholders* lainnya.

DKP, KemenKP, Kemenhut dan BKSDA merupakan instansi pemerintah yang memiliki kesamaan tugas yaitu melakukan kegiatan perlindungan dan pengawetan penyu yang bertujuan kelestarian penyu dan habitatnya. Dengan demikian kelestarian penyu merupakan kepentingan utama bagi keempat instansi pemerintah tersebut.

Adapun pada kegiatan pemanfaatan selain DKP, pemerintah pusat dan desa, maka KMPP dan masyarakat Desa Pangumbahan juga memiliki nilai penting yang tinggi. Bagi masyarakat Desa Pangumbahan, kegiatan pemanfaatan memiliki nilai komunikasi yang tinggi karena nilai penyu yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Adanya kegiatan ekowisata penyu yang terdiri dari pelepasan tukik ke pantai dan kegiatan penyu bertelur di KKP Pangumbahan merupakan daya tarik bagi wisatawan. Kondisi ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Masyarakat mengembangkan berbagai kegiatan jasa yaitu ojek, warung dan penginapan.

Pengaruh *stakeholders* mengindikasikan kekuatan *stakeholders* dalam mempengaruhi pengelolaan penyu di KKP Pangumbahan. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi pada kegiatan perlindungan adalah DKP, KemenKP, aparat penegak hukum dan BBKSDA. Pengaruh yang tinggi bagi

stakeholders tersebut karena memiliki *organization power* yang tinggi yaitu memiliki tupoksi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan jejaring kerja yang luas dalam kegiatan perlindungan penyu.

Adapun pada kegiatan pengawetan, *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi adalah DKP, KemenKP dan WWF. Bagi WWF, pengaruh yang tinggi disebabkan WWF memiliki *organization power* yang tinggi yaitu visi dan misi WWF dalam pengawetan penyu sesuai dengan tujuan pengelolaan KKP Pangumbahan. Selain itu, WWF memiliki SDM yang berkualitas dalam pengawetan penyu dan juga memiliki jejaring kerja nasional dan internasional yang luas dalam konservasi penyu.

Pada kegiatan pemanfaatan, *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi adalah DKP, KemenKP dan Dispar. Sementara itu masyarakat memiliki pengaruh yang rendah. Pengaruh masyarakat yang rendah ini disebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan memberikan sanksi/hukuman yang sepadan terhadap *stakeholders* lain yang memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan pemanfaatan konservasi penyu (*condign power*), tidak mampu mengkompensasi *stakeholders* lainnya (*compensatory power*), tidak dapat memanipulasi kepercayaan atau pembentukan opini dan informasi (*conditioning power*) dan tidak memiliki massa, jejaring kerja, kesesuaian bidang tugas atau kontribusi fasilitas (*organization power*).

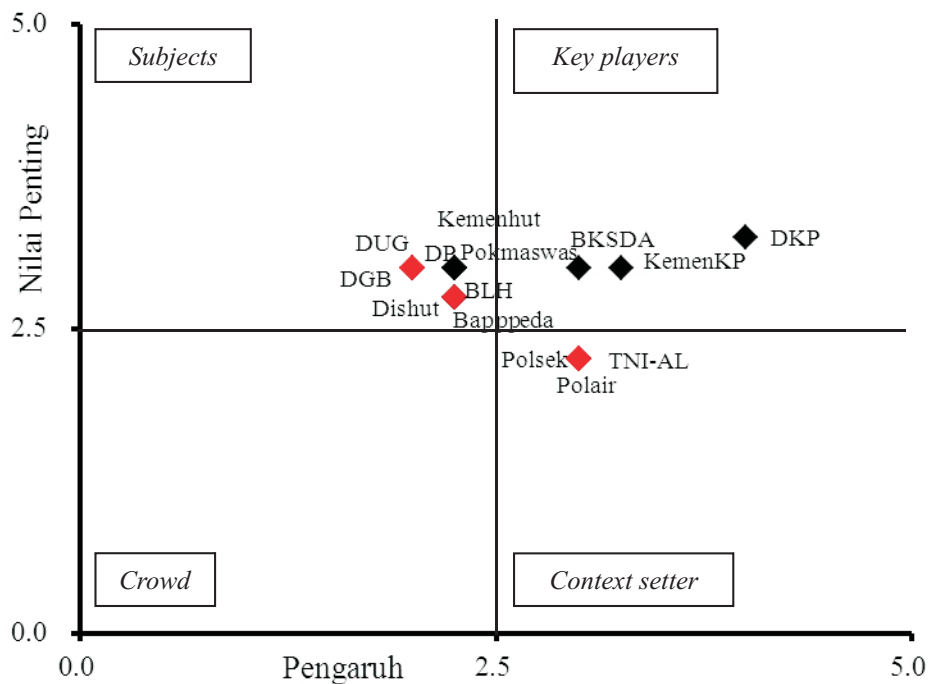
D. Klasifikasi Stakeholders

Klasifikasi *stakeholders* dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan dilakukan dengan menafsirkan matriks klasifikasi *stakeholders*. Matriks tersebut merupakan kombinasi dari nilai penting dan pengaruh *stakeholders* melalui kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.

Pada kegiatan perlindungan, sebaran posisi *stakeholders* menunjukkan bahwa pada posisi *subjects* ditempati oleh Kemenhut, Dishut, BLH, Bappeda, desa dan Pokmaswas yang memiliki nilai penting yang tinggi terhadap kegiatan perlindungan konservasi penyu, namun memiliki pengaruh yang rendah (Gambar 1). Pengaruh yang rendah bagi Kemenhut disebabkan Kemenhut tidak memiliki *condign power* (memberikan sanksi baik sanksi finansial maupun sanksi administrasi) dan *compensatory power* (mengadakan kegiatan/program perlindungan penyu) karena KKP Pangumbahan bukan merupakan UPT langsung yang berada dibawah wewengannya. Sehubungan dengan itu, Kemenhut tidak berpengaruh langsung terhadap KKP Pangumbahan. Sungguhpun demikian, nilai penting konservasi penyu bagi Kemenhut menunjukkan bahwa Kemenhut

memberikan nilai sosial penyu yang tinggi yaitu nilai kelestarian penyu dan habitatnya, sehingga Kemenhut menetapkan kebijakan konservasi penyu melalui PP No. 7 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyu merupakan satwa dilindungi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menetapkan KKP Pangumbahan sebagai salah satu kawasan konservasi penyu.

Bagi Dishut, BLH dan Bappeda, pengaruh yang rendah ini disebabkan *condign power* dan *compensatory power* rendah. Ketiga *stakeholders* tidak memiliki wewenang memberikan sanksi hukum dalam perlindungan penyu dan tidak mempunyai program kegiatan perlindungan penyu di KKP Pangumbahan. Kondisi ini menunjukkan kegiatan perlindungan konservasi penyu belum menjadi fokus utama bagi *stakeholders* tersebut. Menurut Campbell (2007), kepentingan satwa liar bersaing dengan nilai ekonomi.



Gambar 1. Matriks nilai penting dan pengaruh *stakeholders* kegiatan perlindungan
 Figure 1. Importance and influence matrix of protection activities by stakeholders

Pada posisi *key players* terdapat beberapa *stakeholders* yaitu DKP, KemenKP dan BBKSDA. DKP memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi berkenaan dengan tanggung jawab sebagai pengelola KKP Pangumbahan. Kegiatan perlindungan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan razia tim gabungan. Adapun objek razia adalah peredaran dan penjualan produk penyus (terutama telur penyus), pengrusakan hutan pantai dan pencurian telur penyus di kawasan konservasi penyus Pantai Pangumbahan. Selain itu, DKP menempatkan petugas untuk menjaga pantai peneluran penyus pada malam hari.

KemenKP memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi karena tingginya peranan kementerian tersebut dalam mendorong terbentuknya KKP Pangumbahan dan dukungan finansial terhadap pembangunan sarana dan prasarana KKP Pangumbahan. Sarana dan prasarana perlindungan yang diberikan berupa pembangunan pondok jaga, *shelter* dan sarana penunjang lainnya. Selain DKP dan KemenKP, BBKSDA juga merupakan pengelola kawasan konservasi penyus di Sukabumi. Kawasan konservasi penyus yang dikelola oleh BBKSDA berada pada Suaka Margasatwa Cikepuh yang hanya dibatasi oleh muara Sungai Cipanarikan dengan KKP Pangumbahan. BBKSDA memiliki 8 pantai peneluran penyus, tetapi sebagian besar penyus bertelur hanya pada 3 pantai yaitu Pantai Citirem, Cibulakan dan Hujungan. Kegiatan perlindungan yang dilakukan baik secara bersama melalui patroli maupun penjagaan pantai oleh petugas Polhut BBKSDA memiliki pengaruh yang tinggi bagi perlindungan konservasi penyus.

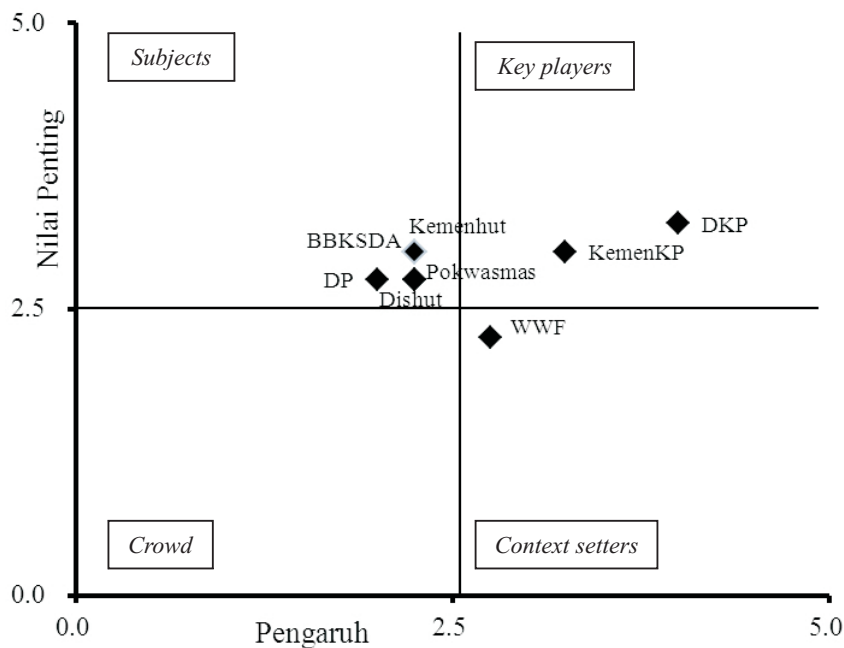
Posisi kuadran *context setter* ditempati oleh aparat penegak hukum yaitu TNI-AL, Polsek dan Polair. Menurut Groenendijk (2003), *stakeholders* pada kategori ini mempunyai pengaruh yang tinggi tetapi memiliki nilai penting yang rendah. Aparat

penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan pengawasan konservasi penyus. Hasil pengamatan menunjukkan keberadaan penegak hukum langsung di KKP Pangumbahan membuat masyarakat yang mencuri telur (penggemar) takut dan sulit untuk mengambil telur penyus. Dukungan terhadap *stakeholders* ini masih perlu terus ditingkatkan. Dukungan tersebut dapat berupa peningkatan koordinasi antara *stakeholders*, penegakan sanksi hukum dan penyediaan sarana prasarana kegiatan perlindungan konservasi penyus. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa pelaku pencurian telur penyus selama ini banyak yang divonis bebas. Selain itu, sarana kapal untuk patroli pengawasan di laut sangat kurang. Kondisi ini sesuai dengan Eliason (2011) yang menyatakan bahwa dukungan pengadilan dan pembiayaan yang kurang merupakan isu utama dalam penegakan hukum konservasi.

Pemetaan *stakeholders* kegiatan pengawetan konservasi penyus (Gambar 2) menunjukkan bahwa Kemenhut, BBKSDA, Dishut, Desa Pangumbahan dan Pokmaswas menempati posisi *subjects* yaitu memiliki nilai penting yang tinggi terhadap pengawetan konservasi penyus, namun memiliki pengaruh yang rendah. *Stakeholders* pada kuadran *subjects* yang memerlukan pemberdayaan adalah Desa Pangumbahan dan Pokmaswas. Kedua *stakeholders* tersebut berpendapat bahwa penyus memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga menginginkan kegiatan pengawetan yang akan meningkatkan kelestarian penyus. Kelestarian penyus tersebut berdampak bagi tingginya minat wisatawan untuk melihat penyus di KKP Pangumbahan, sehingga menunjang peningkatan ekonomi Desa Pangumbahan. Selain itu, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di wilayah administrasinya merupakan kewajiban bagi kepala desa.

Sebagaimana kegiatan perlindungan, posisi *key players* pada kegiatan pengawetan terdapat *stakeholders* yang merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki nilai penting dan pengaruh yang sama-sama tinggi yaitu DKP dan KemenKP. Pengaruh kedua *stakeholders* ini tinggi karena merekalah yang mengorganisir kegiatan pengawetan konservasi penyu di KKP Pangumbahan. DKP

merealisasikan kegiatan penetasan semi alami yaitu memindahkan telur penyu ke lokasi penangkaran. Relokasi telur penyu atau pemindahan sarang ke tempat yang aman dilakukan untuk menjamin keberhasilan penetasan telur penyu dan keamanannya (Priyono, 1989; Turkozan dan Yilmaz, 2007). Selain kegiatan penetasan telur penyu, DKP juga melakukan penanaman vegetasi pantai.



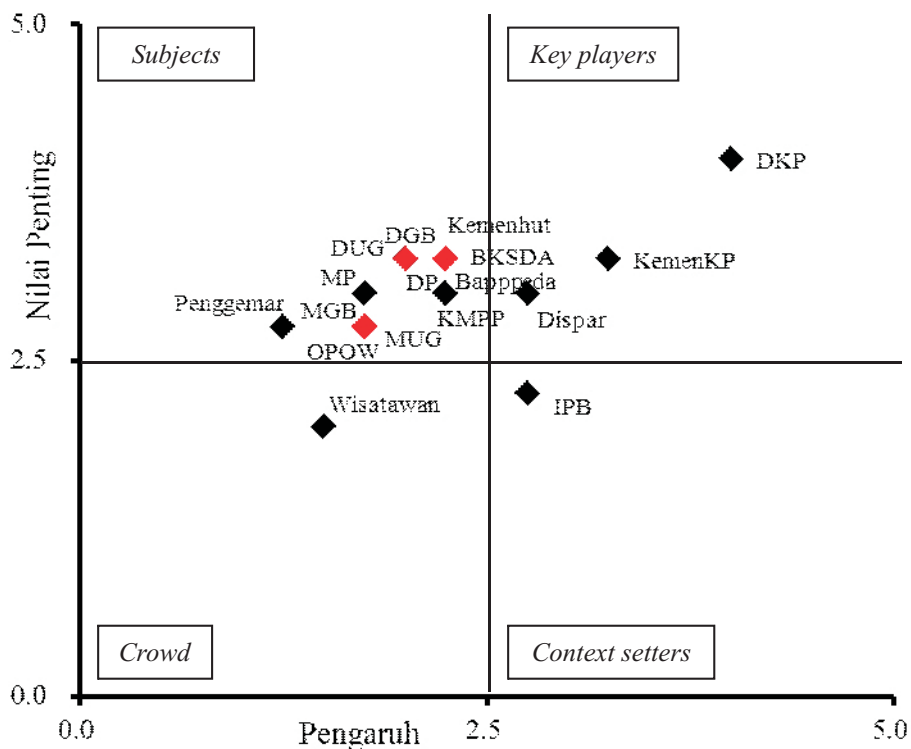
Gambar 2 Matriks nilai penting dan pengaruh *stakeholders* kegiatan pengawetan
Figure 2. Importance and influence matrix of preservation activities stakeholders

Peranan KemenKP dalam kegiatan pengawetan adalah membangun sarana dan prasarana kegiatan pengawetan. Sarana dan prasarana tersebut berupa pembangunan ruang penetasan, ruang tukik dan sarana penunjang penangkaran penyu.

Posisi *context setter* ditempati oleh WWF. Tujuan utama WWF adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan alam. Kegiatan WWF di KKP Pangumbahan adalah melakukan pengembangan kapasitas melalui pelatihan teknis konservasi penyu bagi karyawan, pengawas, pemandu wisata konservasi dan pokmaswas. WWF juga

menjadi intermediasi konflik antara DKP dengan masyarakat. Masyarakat menggugat bahwa DKP belum melakukan pengelolaan dengan baik karena masih terjadi pencurian telur penyu dan tukik.

Pada kegiatan pemanfaatan (Gambar 3), posisi *subjects* ditempati oleh Kemenhut, BBKSDA, Bappeda, Desa dan masyarakat (penggemar, masyarakat Desa Pangumbahan, masyarakat Desa Ujung Genteng, masyarakat Desa Gunung Batu, OPOW). Kategori ini menunjukkan bahwa *stakeholders* tersebut memiliki nilai penting yang tinggi terhadap pemanfaatan konservasi penyu, namun memiliki pengaruh yang rendah.



Gambar 3. Matriks nilai penting dan pengaruh *stakeholders* kegiatan pemanfaatan
 Figure 3. Importance and influence matrix of utilization activities stakeholders

Pengaruh masyarakat yang rendah disebabkan masih rendahnya *organization power* yaitu kapasitas SDM masyarakat, sehingga masyarakat seringkali diposisikan sebagai obyek. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Roslinda, *et al.* (2012). Menurut Risien dan Tilt (2008), untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan penyu berbasis masyarakat maka kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan. Kondisi ini memerlukan proses pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan mengikutsertakan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan (Soetomo, 2011). Namun, masyarakat memiliki nilai penting yang tinggi terhadap kegiatan pemanfaatan konservasi penyu. Latar belakang utama tentunya berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Jika melihat aspek historis, sejak dulu masyarakat sudah memanfaatkan telur penyu dan sebelum tahun 2008 pemanfaatan telur penyu dilegalkan di Pantai Pangumbahan.

Pada kuadran *key players* terdapat tiga *stakeholders* yaitu DKP, KemenKP dan Dispar. Pengaruh DKP terletak pada kemampuannya dalam memberikan *condign power* yaitu pengaruh kepada *stakeholders* lainnya dengan kekuatan peraturan perundangan yang dilaksanakannya dan *organisation power* yang dimilikinya.

Dispar memiliki pengaruh dan nilai penting yang tinggi terhadap kegiatan pemanfaatan konservasi penyu karena kegiatan promosi yang dilakukan Dispar melalui berbagai pameran telah meningkatkan kunjungan wisatawan ke KKP Pangumbahan. Kegiatan mengamati penyu bertelur merupakan atraksi yang menarik bagi wisatawan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2009). IPB pada posisi *context setter* mempunyai pengaruh yang tinggi karena hasil penelitian IPB menjadi masukan dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan.

Wisatawan memiliki nilai penting dan pengaruh rendah dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan. Wisatawan hanya memiliki kepentingan terhadap kegiatan wisata. Hasil wawancara dengan wisatawan menunjukkan bahwa umumnya tujuan ke KKP Pangumbahan untuk berwisata alam atau memanfaatkan waktu luang dibandingkan kegiatan dengan fokus konservasi. Dengan demikian, perlu diupayakan kegiatan sosialisasi konservasi penyu kepada wisatawan diantaranya melalui program pemutaran film dan penyuluhan sebelum mereka melihat penyu bertelur dan pelepasan tukik di pantai. Wisatawan membutuhkan monitoring dan evaluasi namun dengan prioritas rendah. Akan tetapi, wisatawan juga perlu dilibatkan untuk mendukung setiap kegiatan pengelolaan konservasi penyu.

E. Hubungan Stakeholders

Stakeholders dalam pengelolaan konservasi penyu teridentifikasi memiliki interaksi atau hubungan konflik dan komunikasi dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP

Pangumbahan. Analisis hubungan ini penting untuk mengetahui hambatan dan dukungan *stakeholders* terhadap pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan.

Secara umum, konflik pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan terjadi dalam berbagai bentuk (Gambar 4). Konflik antara DKP dan BBKSDA berada dalam bentuk latent. Bentuk latent dicirikan adanya tekanan yang tidak tampak, belum terangkat ke puncak konflik dan salah satu pihak atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik (Sembiring, *et al.* 2010). DKP dan BBKSDA merupakan pengelola penyu di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sukabumi yaitu KKP Pangumbahan dikelola DKP dan SM. Cikepuh oleh BBKSDA. Konflik terjadi karena masih beredarnya telur penyu di pasaran. Masing-masing pengelola beranggapan bahwa telur penyu yang beredar bukan berasal dari kawasan mereka, tetapi dari kawasan konservasi penyu yang satunya. Kondisi ini menyebabkan kerjasama dan koordinasi yang belum optimal dalam pengelolaan konservasi penyu diantara kedua pengelola tersebut.

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Pemerintah Desa	Masyarakat	LSM	Perguruan Tinggi
Pemerintah Pusat	-	□	-	-	-	-
Pemerintah Daerah		-	○	○	-	-
Pemerintah Desa			-	-	-	-
Masyarakat				□	-	-
LSM					-	-
Perguruan Tinggi						-

Keterangan : □ : konflik latent, ○ : konflik mencuat

Gambar 4. Matriks konflik *stakeholders*
 Figure 4. Stakeholders conflict matrix

Konflik latent juga terjadi antar masyarakat yaitu masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) dengan masyarakat Desa Pangumbahan. Masyarakat Desa Pangumbahan merasakan terjadi kesenjangan ekonomi dengan THL. Masyarakat melihat bahwa kehidupan ekonomi THL lebih baik sejak dilibatkan dalam pengelolaan konservasi penyu di KKP Pangumbahan.

Selanjutnya, konflik mencuat terjadi antara DKP dan masyarakat (Pokmaswas, KMPP, Masyarakat Desa Pangumbahan dan Penggemar). Masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan konservasi penyu yang dilakukan DKP belum sesuai dengan peraturan karena mereka melihat masih terjadi pencurian telur penyu, pencurian tukik serta pengelolaan penyu dan habitatnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Masyarakat juga meminta diikutsertakan dalam pengelolaan konservasi penyu melalui kolaborasi. Masyarakat menganggap selama ini hanya sebagai penonton saja. Masyarakat belum merasa dilibatkan secara penuh. Konflik ini memuncak pada Januari 2013 karena masyarakat berdemonstrasi ke kantor DKP.

Konflik juga terjadi antara DKP dengan Pemerintah Desa yaitu Desa Pangumbahan.

Desa Pangumbahan merasa belum dilibatkan dalam pengelolaan KKP Pangumbahan. Keterlibatan desa hanya di awal pendirian UPTD saja, tetapi saat ini mereka tidak dilibatkan lagi dalam pengelolaan. Selain itu, Desa Pangumbahan menginginkan adanya pembagian insentif untuk desa dari pengelolaan KKP Pangumbahan.

Disamping adanya konflik antar *stakeholders*, komunikasi antar *stakeholders* juga terjadi. Gambar 5 memperlihatkan terjadinya komunikasi antar *stakeholders* pengelolaan konservasi penyu.

Komunikasi bersifat kooperatif antara Pemerintah Pusat yaitu Kemenhut dan KemenKP terjalin melalui pertemuan formal diantaranya merancang kebijakan konservasi penyu yaitu pembuatan draft Strategi dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu Tahun 2013. KKP Pangumbahan termasuk wilayah yang menjadi target dalam strategi dan rencana aksi tersebut. Komunikasi kooperatif juga terjadi antara KemenKP dan WWF. KemenKP bekerja sama dengan WWF dalam melakukan kegiatan konservasi penyu, diantaranya melakukan simposium keberhasilan program konservasi penyu di Indonesia tahun 2012 (Gambar 5).

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Pemerintah Desa	Masyarakat	LSM	Perguruan Tinggi
Pemerintah Pusat	☆	○	-	-	☆	-
Pemerintah Daerah		○	○	○	○	○
Pemerintah Desa			-	□	-	-
Masyarakat				-	-	-
LSM					-	-
Perguruan Tinggi						-

Keterangan : □ : komunikasi instruktif, ○ : komunikasi konsultatif ☆ : komunikasi kooperatif

Gambar 5. Matriks komunikasi *stakeholders*
 Figure 5. *Stakeholders communication matrix*

Sementara itu, komunikasi yang bersifat konsultatif antara DKP dan KemenKP telah berlangsung. DKP melakukan konsultasi dengan KemenKP dalam mengembangkan informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan konservasi penyu. KemenKP memberikan penghargaan kepada Bupati Sukabumi atas komitmen dan dedikasinya terhadap pengembangan kawasan konservasi penyu pada tahun 2009. Selain itu, KemenKP memberikan bantuan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana KKP Pangumbahan. Komunikasi konsultatif juga terjadi antara DKP dan WWF yaitu WWF telah melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan konservasi penyu kepada DKP serta WWF menjadi mediasi konflik antara DKP dengan masyarakat. Komunikasi antara DKP dan IPB yang konsultatif terjalin melalui pertukaran informasi hasil penelitian mahasiswa IPB. Penelitian yang dilakukan mahasiswa IPB telah menambah informasi dan menjadi salah satu masukan bagi DKP dalam kegiatan pengelolaan konservasi penyu.

Komunikasi konsultatif juga terjadi antara instansi Pemda dan DKP. DKP melakukan koordinasi dengan instansi pemda terkait yaitu BLH, Bappeda, Dispar dan Dishut dalam pengelolaan konservasi penyu, termasuk kebijakan pembangunan pada perairan di sekitar KKP.

DKP melalui UPTD Penyu Pangumbahan mulai menjalin komunikasi konsultatif yang lebih intensif dengan masyarakat setelah terjadi konflik. Pertemuan formal maupun informal dilakukan dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi penyu. Begitu juga komunikasi antara Desa Pangumbahan dengan DKP juga mulai terjalin kembali dan bersifat konsultatif. Komunikasi yang terjadi pada awal pembentukan KKP Pangumbahan sempat mengalami hambatan, sehingga timbul konflik yaitu aparat Desa Pangumbahan mengundurkan diri dalam keterlibatan pada pengelolaan konservasi penyu. Namun

demikian, komunikasi dapat terjalin kembali setelah dilakukan mediasi.

Adapun komunikasi instruktif terjadi antara desa dengan masyarakat yaitu melalui kegiatan penyuluhan konservasi penyu yang dilaksanakan pada kegiatan pertemuan di desa. Masyarakat baru sebagai objek penerima informasi dari aparat desa mengenai peraturan konservasi penyu di KKP Pangumbahan.

F. Implikasi Kebijakan

Masyarakat merupakan *stakeholders* yang memiliki nilai penting tinggi dan pengaruh rendah. Nilai penting yang tinggi bagi masyarakat karena konservasi penyu mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Pengaruh yang rendah disebabkan kapasitas masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, kebijakan kegiatan pemanfaatan konservasi penyu yang diperlukan adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan dukungan dan pendampingan dari *stakeholders* terkait seperti penyuluh, LSM atau pemda. Menurut Tamba dan Cipta (2011), kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Kebijakan ini perlu dilakukan agar masyarakat yakin bahwa kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan pengelolaan konservasi penyu dan keterlibatan mereka dalam konservasi penyu sangat bermakna, sehingga dapat mengatasi konflik antara DKP dengan masyarakat.

Stakeholders kegiatan perlindungan yang memiliki pengaruh dan nilai penting tinggi adalah DKP, Kemenhut dan BBKSDA. Ketiga *stakeholders* tersebut merupakan *stakeholders* kunci yang perlu dilibatkan pada seluruh tahapan kegiatan perlindungan agar memberikan keyakinan pada mereka bahwa keberhasilan perlindungan adalah atas

dukungan mereka. Selain itu, kebijakan ini juga akan mengurangi konflik antara DKP dan BBKSDA sebagai pengelola konservasi penyu pada kawasan konservasi penyu di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pengelolaan konservasi penyu melalui kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan di KKP Pangumbahan memperlihatkan bahwa keterlibatan *stakeholders* pada masing-masing kegiatan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan, tugas dan wewenang. Pada umumnya *stakeholders* lebih banyak terlibat pada kegiatan pemanfaatan yaitu 17 *stakeholders* dan keterlibatan terendah pada kegiatan pengawetan yaitu 8 *stakeholders*. Keterlibatan *stakeholders* dalam semua kegiatan masih rendah terutama kegiatan pengawetan. Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam kegiatan pengawetan penyu.
2. Konflik antara *stakeholders* bersifat latent dan mencuat yang disebabkan kurangnya komunikasi dan keterlibatan *stakeholders*. Berdasarkan tingkat komunikasi antara *stakeholders* masih instruktif, konsultatif dan kooperatif.

B. Rekomendasi

1. Perlu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memerlukan pendampingan dari penyuluh, LSM dan Pemda terkait.
2. Perlu meningkatkan kerjasama dalam kegiatan perlindungan dengan melibatkan

DKP dan BBKSDA agar memberikan keyakinan bahwa keberhasilan perlindungan adalah atas dukungan mereka dan akhirnya akan meningkatkan keberhasilan konservasi penyu pada kawasan konservasi penyu di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi.

3. Perlu meningkatkan koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara *stakeholders* terkait baik dalam kegiatan perlindungan, pengawetan maupun pemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. (2005). *Mekanisme perencanaan partisipasi stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2009). *Laporan akhir penyusunan action plan kawasan wisata Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi*. Sukabumi: Bappeda Kabupaten Sukabumi.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kecamatan Ciracap dalam angka 2011*. Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi.
- Bouchard, S.S. & Bjorndal, K.A. (2000). Sea turtles as biological transporters of nutrients and energy from marine to terrestrial ecosystems. *Ecology*, 81(8), 2305-2313.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Butler, J.S., James, S. & Daniel, J.D. (2003). Public attitudes toward wildlife are changing: a trend analysis of New York Residents. *Wildlife Society Bulletin*, 31(4), 1027-1036.

- Campbell, L.M. (2007). Local conservation practice and global discourse: a political ecology of sea turtle conservation. *Annals of the Association of American Geographers* 97(2), 313-334.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. (2011). *Laporan perkembangan pengelolaan kawasan konservasi penyu Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan Kabupaten Sukabumi (sampai tahun 2010)*. Sukabumi: DKP Kabupaten Sukabumi.
- Eliason, S.L. (2011). Policing natural resources: issues in a conservation law enforcement agency. *Professional Issues in Criminal Justice*, 6(3&4), 43-58.
- Gibbons, J.W., Scott, D.E., Ryan, T.J., Buhlmann, K.A., Tuberville, T.D., Metts, B.S. & Winne, C.T. (2000). The global decline of reptiles, déjà vu amphibians. *BioScience* 50(8), 653-665.
- Groenendijk, L. (2003). *Planning and management tools*. Netherlands: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
- Gunawan, D. (2005). *Kajian kelembagaan pengelolaan penyu hijau (Chelonia mydas) di Pantai Pangumbahan dan Pantai Suaka Margasatwa Cikepuh Sukabumi Jawa Barat*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Karnan. (2008). Penyu hijau: status dan konservasinya. *J. Pijar MIPA* 3, 86-91.
- Kellert, S.R. (2007). Social and perceptual factors in endangered species management. *The Journal of Wildlife Management* 49(2), 528-536.
- Nistyantara, L.A. (2011). *Strategi pengelolaan Taman Nasional Kelimutu melalui pendekatan co-management*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Priyono, A. (1989). Pengelolaan habitat dan satwa penyu laut. *Media Konservasi* II(2), 33-38.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J. & Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? a typology of stakeholder analysis methods for natural resources management. *Journal of Environmental Management* 30, 1-17. Doi:10.1016/j.jenrman.2009.01.001.
- Risien, J.M. & Tilt, B. (2008). A comparative study of community based sea turtle management in Palau: key factors for successful implementation. *Conservation and Society* 6(3), 225-237.
- Roslinda, E., Darusman, D., Suharjito, D. & Nurrochmat, D.R. (2012). Analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18(2), 78-85.
- Sembiring, E., Basuni, S. & Soekmadi, R. (2010). Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondana. *JMHT* 16(2), 84-91.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat: mungkinkah muncul antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwelo, I.S., Somantri, A. & Schulz, J.P. (1989). Evaluasi kondisi penyu di Indonesia. *Media Konservasi*, II(3), 25-30.
- Tamba, I.M. & Cipta, I.W. (2011). Analisis partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Karangasem, Bali. *Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem* 1(2), 1-19.

- Turkozan, O. & Yilmaz, C. (2007). Nest relocation as a conservation strategy: looking from a different perspective. *Marine Turtle Newsletter* 118, 6-8.
- Wahid, A. (2008). Pendidikan versus kemiskinan. *Jurnal Nadwa* 2(1), 83-105.
- Wahyuni, I.S., Hartati, S.T. & Subani, W. (1994). Studi tentang penyu dan pemanfaatannya di Bali. *Jurnal Pen. Perikanan Laut* 92, 9-20.
- West, L. (2010). A multi-stakeholder approach to the challenges of turtle conservation in the United Republic of Tanzania. *Indian Ocean Turtle Newsletter* 11, 44-50.